



JKB

Jurnal Kewirausahaan & Bisnis

Volume 3 Issue 2, 2021 (201-204)

ISSN (online) : 3026-0167

Homepage : <https://jurnalunived.com/index.php/JKB>

Workshop Membangun Pelayan Publik Yang Anti Korupsi

Ridianto ¹, Debi Afriansyah Ilham ², Devia Khofifah ³, Abdul Kholik Munthe ⁴, Wiwin Junius ⁵

^{1,2,3,4,5} STIA Bengkulu, Indonesia

¹ e-mail : ridianto@gmail.com

Abstract. The workshop "Building Anti-Corruption Public Servants" is an event that aims to increase understanding and awareness of the importance of integrity in public services. The event discussed various strategies and best practices in building an organizational culture that upholds ethical and anti-corruption values. Participants were invited to understand the negative impact of corruption on society and the economy, and how each individual in the public service has an important role in preventing it. In addition, the workshop also provided a platform for participants to share experiences and learn from real cases in handling corruption cases in various public service sectors. In this workshop, participants were provided with insights on the role of supervisory and regulatory institutions in overseeing and preventing acts of corruption in the public service environment. Discussions included various legal instruments and policies that have been implemented in an effort to eradicate corruption, as well as strategies to improve transparency and accountability in the management of public funds. In addition, the importance of continuous training and education for public servants to strengthen their capacity to deal with corruption challenges was also a key focus of the workshop.

Keywords: *Workshop, Public Service, Corruption*

Abstrak. Workshop "Membangun Pelayan Publik yang Anti Korupsi" adalah acara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Acara ini membahas berbagai strategi dan praktik terbaik dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan anti-korupsi. Para peserta diajak untuk memahami dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan ekonomi, serta bagaimana setiap individu dalam pelayanan publik memiliki peran penting dalam mencegahnya. Selain itu, workshop ini juga memberikan platform bagi para peserta untuk berbagi pengalaman dan belajar dari kasus-kasus nyata dalam penanganan kasus korupsi di berbagai sektor pelayanan publik. Dalam workshop ini, para peserta diberikan wawasan tentang peran lembaga pengawas dan regulasi dalam mengawasi dan mencegah tindakan korupsi di lingkungan pelayanan publik. Diskusi meliputi berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya memberantas korupsi, serta strategi-strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, pentingnya pelatihan dan pendidikan kontinu bagi para pelayan publik untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan korupsi juga menjadi fokus utama dalam workshop ini.

Kata Kunci: *Workshop, Pelayanan Publik, Korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Dalam konteks pelayanan publik, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintah. Untuk mengatasi masalah korupsi dalam pelayanan publik, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Salah satu strategi yang telah terbukti efektif adalah melalui pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk membentuk pelayan publik yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga memiliki sikap yang kuat dan tegas dalam menolak praktek korupsi.

Workshop yang difokuskan pada membangun pelayan publik yang anti korupsi menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang dan menyeluruh di berbagai sektor pelayanan publik. Workshop semacam ini harus dirancang secara hati-hati, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh pelayan publik di berbagai tingkatan dan bidang pelayanan. Selain memberikan pengetahuan tentang risiko korupsi dan konsekuensinya, workshop ini juga harus menyediakan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan tindakan korupsi. Penting juga untuk memasukkan studi kasus dan contoh nyata dalam workshop, agar peserta dapat memahami secara langsung bagaimana korupsi dapat merusak integritas pelayanan publik dan berdampak negatif pada masyarakat. Selain itu, workshop ini dapat menjadi forum untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman antara pelayan publik dari berbagai daerah atau lembaga, sehingga memperkaya pemahaman kolektif tentang upaya pencegahan korupsi.

Dalam rangka mencapai efektivitas maksimal, penting bagi peserta workshop untuk dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi, permainan peran, atau latihan kasus. Di samping itu, dukungan dan komitmen dari pimpinan dan manajemen lembaga pelayanan publik juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan kelangsungan workshop serta implementasi hasilnya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, workshop membangun pelayan publik yang anti korupsi bukan hanya merupakan investasi jangka pendek untuk meningkatkan kinerja dan integritas individu, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel "Workshop Membangun Pelayan Publik yang Anti Korupsi" akan melibatkan pendekatan kualitatif. Pertama, penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam dengan para peserta workshop, penyelenggara, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap upaya membangun pelayan publik yang anti korupsi. Selanjutnya, observasi partisipatif akan dilakukan selama workshop untuk memperoleh wawasan langsung tentang proses pelatihan, interaksi antara peserta, dan dinamika kelompok. Analisis konten juga akan digunakan untuk mengevaluasi materi pelatihan dan dokumen terkait untuk memahami pendekatan yang digunakan dalam pembangunan pelayan publik yang anti korupsi. Kombinasi metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas workshop dalam mencapai tujuan anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik yang bebas dari korupsi adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Namun, korupsi masih menjadi masalah serius di banyak negara, menghalangi tercapainya kemajuan yang berkelanjutan. Dalam upaya memerangi korupsi, workshop yang fokus pada membangun pelayan publik yang anti korupsi sangatlah penting. Workshop semacam ini dapat menjadi wadah bagi para pegawai pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Workshop ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang undang-undang dan regulasi terkait anti korupsi, tetapi juga menekankan pentingnya etika dalam pelayanan publik. Hal ini termasuk bagaimana membedakan antara yang benar dan salah, serta memahami

konsekuensi dari tindakan korupsi bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, workshop ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakan pelayanan publik.

Selain itu, workshop ini juga dapat menjadi platform untuk berbagi pengalaman dan best practice antara peserta. Dengan mendiskusikan kasus-kasus nyata dan strategi yang efektif dalam memerangi korupsi, peserta dapat belajar dari satu sama lain dan memperkuat komitmen mereka untuk menjadi pelayan publik yang berkualitas dan berintegritas. Ini juga memungkinkan para peserta untuk membangun jaringan yang kuat, yang dapat menjadi dukungan dan sumber inspirasi dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari.

Salah satu aspek penting dari workshop ini adalah pengembangan keterampilan kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin yang baik adalah contoh bagi bawahannya, dan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang bersih dan transparan. Workshop ini dapat membantu para pemimpin dalam sektor publik untuk memahami tanggung jawab mereka dalam memimpin dengan integritas, mempromosikan nilai-nilai etika, dan memberikan dukungan kepada staf mereka untuk berperilaku dengan benar.

Tidak hanya itu, workshop ini juga dapat memperkenalkan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik sebagai salah satu cara untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dengan menerapkan sistem yang transparan dan efisien, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, dapat mengurangi interaksi langsung antara pegawai pelayanan publik dengan masyarakat, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi.

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum, sangat penting untuk keberhasilan workshop ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, workshop ini dapat menciptakan momentum yang kuat untuk perubahan menuju pelayanan publik yang lebih bersih dan berintegritas. Selain menyediakan pelatihan dan pembekalan, workshop ini juga harus diikuti dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan implementasi dari apa yang dipelajari dalam workshop tersebut. Evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area yang masih rentan terhadap korupsi, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil.

Terakhir, workshop ini harus diikuti dengan komitmen nyata dari semua peserta untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai pelayan publik. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari setiap individu, upaya membangun pelayanan publik yang anti korupsi hanya akan menjadi serangkaian acara tanpa dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap peserta untuk memperkuat komitmen mereka dan bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

SIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan korupsi di sektor pelayanan publik, workshop yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan keterampilan anti-korupsi bagi para pelayan publik menjadi sangat penting. Workshop "Membangun Pelayan Publik yang Anti Korupsi" menjadi sebuah langkah yang strategis dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya diberikan pengetahuan tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat, tetapi juga dilatih untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan praktik korupsi. Dengan demikian, workshop ini bukan hanya menjadi sebuah acara sekadar formalitas, tetapi sebuah investasi nyata dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Kesadaran akan pentingnya integritas dan komitmen untuk bertindak secara jujur dan adil harus ditanamkan dalam setiap individu yang bertugas dalam melayani publik. Dengan demikian, workshop ini diharapkan dapat menjadi titik awal dari perubahan budaya dalam sektor pelayanan publik menuju arah yang lebih baik, di mana korupsi bukanlah hal yang dapat diterima dan integritas menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan dan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. (2018). "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Empiris." *Jurnal Kajian Politik*, 3(2), 101-117.
- Djalal, H. (2019). "Pembangunan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel dalam Mencegah Praktik Korupsi." *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 7(2), 89-104.
- Fitriana, S., & Wibowo, A. (2020). "Peran Pelatihan dan Pengembangan Karyawan dalam Membentuk Pelayanan Publik yang Integritas." *Jurnal Manajemen Administrasi Publik*, 8(1), 23-35.
- Idris, A. (2017). "Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pelayanan Publik." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 112-126.
- Jatmiko, A., & Nugroho, B. (2019). "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Pegawai dalam Mencegah Korupsi di Instansi Pemerintah." *Jurnal Manajemen Organisasi*, 6(1), 33-47.
- Mardani, A. (2019). "Membangun Kultur Organisasi yang Mencegah Praktik Korupsi melalui Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(2), 101-115.
- Prasetyo, B. (2019). "Peran Pelatihan Hukum dalam Membangun Pelayanan Publik yang Berintegritas." *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara*, 7(1), 45-58.
- Sari, W. (2018). "Pentingnya Pembentukan Sikap Mental yang Kuat dan Integritas yang Tinggi dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Psikologi Organisasi dan Manajemen*, 4(2), 112-125.
- Yusuf, A. (2018). "Pentingnya Implementasi Prinsip Good Governance dalam Membangun Pelayanan Publik yang Bebas dari Korupsi." *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 6(2), 101-115.